

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

SATKER BAWASLU PROVINSI BANTEN

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 2022		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
			4	5		
1	2	3	4	Satuan	6	7
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				7.929.363.000	
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC				7.929.363.000	Provinsi & Kabupaten/ Kota
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan	252.488.000	
	Indikator KRO :					
	01 Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP		100	%		
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi		1	Layanan	137.768.000	
	Komponen Input :					
	051 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran: 1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran (2 laporan) 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran	3	Laporan	48.976.000	Provinsi
	052 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses: 1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran (2 laporan) 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	3	Laporan	88.792.000	Provinsi
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan	114.720.000	
	Komponen Input :					
	051 Koordinasi penanganan pelanggaran	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	2 x Jumlah Kab/Kota	Laporan	57.360.000	Kab/Kota
	052 Koordinasi penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	2 x Jumlah Kab/Kota	Laporan	57.360.000	Kab/Kota
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga	135.251.000	
	Indikator KRO :					
	01 Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		34	Daerah		
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga	135.251.000	RPJMN
	Komponen Input :					
	051 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah	135.251.000	Provinsi
BKC	Pemantauan Lembaga			Laporan	1.330.038.000	
	Indikator KRO :					
	01 Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan		100	%		
001	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi		12	Laporan	430.118.000	
	Komponen Input :					
	051 Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	28.550.000	Provinsi
	052 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	2	Laporan	321.936.000	Provinsi
	053 Evaluasi pelaksanaan pengawasan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan		Provinsi
	054 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	4	Laporan	79.632.000	Provinsi
	055 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)	1	Laporan	Provinsi
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota			Laporan	899.920.000	
	Komponen Input :					
	051 Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah Kab/Kota	Laporan	173.519.000	Kab/Kota
	052 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	2 x Jumlah Kab/Kota	Laporan	458.880.000	Kab/Kota
	053 Evaluasi pelaksanaan pengawasan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan		Kab/Kota
	054 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	4 x Jumlah Kab/Kota	Laporan	94.321.000	Kab/Kota
	055 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)	Jumlah Kab/Kota	Laporan	173.200.000	Kab/Kota

SATKER BAWASLU PROVINSI BANTEN

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
				Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		9	Lembaga	6.211.586.000	PN
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01 Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		548	Daerah		
001	Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Bawaslu Provinsi		1	Lembaga	1.104.930.000	PN Tahapan Pemilu
	<i>Komponen Input :</i>					
	051 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilu	Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilu, kegiatan audit dan investigasi informasi awal dan temuan dugaan pelanggaran pemilu, dan pengawasan siber serta isu khusus	1	Laporan	57.700.000	Provinsi
	052 Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif	1	Laporan	30.583.000	Provinsi
	053 Fasilitasi dan koordinasi pemantau pemilu	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemantau pemilu	0	Laporan		Provinsi
	054 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan pendampingan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses pemilu	1	Laporan	57.650.000	Provinsi
	055 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran tahapan	1	Laporan	57.650.000	Provinsi
	056 Fasilitasi netralitas ASN	Jumlah fasilitasi netralitas ASN (Variabel Pemilu yang Bebas & Adil, Indikator Nomor 18)	1	Laporan	16.350.000	Provinsi
	057 Desiminasi Peraturan Bawaslu	Jumlah laporan desiminasi peraturan Bawaslu	1	Laporan	30.400.000	Provinsi
	058 Fasilitasi sentra penegakan hukum terpadu	Jumlah laporan penanganan pelanggaran pemilu yang diproses oleh sentra penegakkan hukum terpadu	1	Laporan	47.031.000	Provinsi
	059 Fasilitasi pengelolaan administrasi dan konsolidasi sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi pengelolaan administrasi dan konsolidasi sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu	1	Laporan	74.250.000	Provinsi
	060 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan	1	Laporan	733.316.000	Provinsi
002	Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota		8	Lembaga	5.106.656.000	PN Tahapan Pemilu
	<i>Komponen Input :</i>					
	051 Pembentukan/pembekalan Pengawas Pemilu Kecamatan	Jumlah laporan pembentukan/pembekalan Pengawas Pemilu Kecamatan	0	Laporan	1.010.147.000	Kab/Kota
	052 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilu	Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilu, kegiatan audit dan investigasi informasi awal dan temuan dugaan pelanggaran pemilu, dan pengawasan siber serta isu khusus	8	Laporan	459.700.000	Kab/Kota
	053 Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif	8	Laporan	218.400.000	Kab/Kota
	054 Fasilitasi dan koordinasi pemantau pemilu	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemantau pemilu	0	Laporan		Kab/Kota
	055 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses Pemilu	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan pendampingan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses pemilu	8	Laporan	459.700.000	Kab/Kota
	056 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran tahapan pemilu	Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran tahapan pemilu	8	Laporan	459.700.000	Kab/Kota
	057 Fasilitasi netralitas ASN	Jumlah fasilitasi netralitas ASN (Variabel Pemilu yang Bebas & Adil, Indikator Nomor 18)	8	Laporan	218.400.000	Kab/Kota
	058 Desiminasi Peraturan Bawaslu	Jumlah laporan desiminasi peraturan Bawaslu	8	Laporan	144.800.000	Kab/Kota
	059 Fasilitasi sentra penegakan hukum terpadu	Jumlah laporan penanganan pelanggaran pemilu yang diproses oleh sentra penegakkan hukum terpadu	8	Laporan	315.600.000	Kab/Kota
	060 Fasilitasi pengelolaan administrasi dan konsolidasi sekretariat pengawas pemilu ad-hoc dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi pengelolaan administrasi dan konsolidasi sekretariat Panwaslu Ad-hoc dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu	8	Laporan	329.179.000	Kab/Kota
	061 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan	8	Laporan	1.491.030.000	Kab/Kota
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				25.183.135.000	
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM				25.183.135.000	Provinsi & Kabupaten/ Kota
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6	Layanan	23.306.850.000	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		
956	Layanan BMN		1	Layanan	91.117.000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan: 1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota	6	Laporan	41.011.000	Provinsi
	052 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset persemester	16	Laporan	50.106.000	Kab/Kota
957	Layanan Hukum		1	Layanan	244.632.000	
	<i>Komponen Input :</i>					

SATKER BAWASLU PROVINSI BANTEN

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
				Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
051	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan: 1. laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota	2	Laporan	92.886.000	Provinsi
052	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemilikan (pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses)	1	Laporan	9.625.000	Provinsi
053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	8	Laporan	142.121.000	Kab/Kota
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	Layanan	252.287.000	
	Komponen Input :					
051	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi: keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota	5	Laporan	147.966.000	Provinsi
052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi: 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota	32	Laporan	104.321.000	Kab/Kota
963	Layanan Data dan Informasi		1	Layanan	525.300.000	
	Komponen Input :					
051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia: 1. Laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester 2. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kab/Kota	3	Laporan	40.500.000	Provinsi
052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester	16	Laporan	484.800.000	Kab/Kota
969	Layanan Bantuan Hukum		1	Layanan	65.686.000	
	Komponen Input :					
051	Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	65.686.000	Provinsi
994	Layanan Perkantoran		1	Layanan	22.127.828.000	
	Komponen Input :					
001	Gaji dan tunjangan	Jumlah layanan gaji dan tunjangan	1	Layanan	9.422.056.000	Prov & Kab/Kota
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor	1	Layanan	12.705.770.000	Prov & Kab/Kota
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		18	Unit	270.000.000	
	Indikator KRO :					
01	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		80	%		
951	Layanan Sarana Internal		18	Unit	270.000.000	
	Komponen Input :					
051	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit		Provinsi
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Jumlah Unit	Unit	Provinsi
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	2	Unit	42.000.000	Provinsi
054	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit		Kab/Kota
055	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Jumlah Unit	Unit	Kab/Kota
056	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	16	Unit	228.000.000	Kab/Kota
971	Layanan Prasarana Internal			Unit		
	Komponen Input :					
051	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit		Provinsi
052	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit		Provinsi
053	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit		Kab/Kota
054	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit		Kab/Kota
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		160	Orang	219.426.000	
	Indikator KRO :					
01	Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		
954	Layanan Manajemen SDM		160	Orang	219.426.000	
	Komponen Input :					
051	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparaturnya pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan (pegawai provinsi)	40	Orang	134.582.000	Provinsi

SATKER BAWASLU PROVINSI BANTEN

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab	
				Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	
	052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya dan sekretariat yang dilakukan pembinaan (pegawai kabupaten/kota)	120	Orang	84.844.000	Kab/Kota
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			180	Dokumen	1.386.859.000	
	Indikator KRO :						
	01	Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			10	Dokumen	103.995.000	
	Komponen Input :						
	051	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran: 1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran	2	Dokumen	11.450.000	Provinsi
	052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	8	Dokumen	92.545.000	Kab/Kota
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			15	Dokumen	365.316.000	
	Komponen Input :						
	051	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program: 1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota	7	Dokumen	233.428.000	Provinsi
	052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	8	Dokumen	131.888.000	Kab/Kota
955	Layanan Manajemen Keuangan			110	Dokumen	586.270.000	
	Komponen Input :						
	051	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan: 1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran	14	Dokumen	83.900.000	Provinsi
	052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan	96	Dokumen	502.370.000	Kab/Kota
961	Layanan Reformasi Kinerja			36	Dokumen	137.455.000	
	Komponen Input :						
	051	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan masyarakat	4	Dokumen	43.350.000	Provinsi
	052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan masyarakat	32	Dokumen	94.105.000	Kab/Kota
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			9	Dokumen	193.823.000	
	Komponen Input :						
	051	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	120.322.000	Provinsi
	052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	8	Dokumen	73.501.000	Kab/Kota
TOTAL						33.112.498.000	

Jakarta, September 2021
 BAWASLU PROVINSI BANTEN
 P.T. KEPALA SEKRETARIAT,

 Drs. ASMIN SAFARI LUBIS
 NIP. 19740202 199303 1 002